



Kita sudah menyerahkan apa yang diminta Polda. Hasil perhitungan kerugian negara, lebih kurang satu bulan lalu penyerahannya

Adi Sudibyo

## Hasil Audit Sudah Diserahkan

**PONTIANAK** - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat telah menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara untuk kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI kepada Polda Kalbar. Sementara penyerahan hasil audit telah lama dilakukan, jauh sebelum hasil perhitungan kerugian negara diberikan.

"Kita sudah menyerahkan apa yang diminta Polda. Hasil perhitungan kerugian negara, lebih kurang satu

bulan lalu penyerahannya," kata Kepala BPK Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo, Rabu (16/5) di Pontianak.

Menurut dia, hasil perhitungan yang diberikan merupakan untuk kepentingan penyidikan pihak kepolisian, yang proses (penyidikan) tersebut bukan menjadi domain BPK. Namun hanya sebatas melakukan perhitungan kerugian negara sesuai yang diminta.

• ke halaman 15 kolom 2

## Hasil Audit Sudah Diserahkan

*Sambungan dari halaman 9*

Dia menambahkan sebanyak tiga item perhitungan kerugian yang telah diserahkan ke Polda. Jumlah item perhitungan tersebut semua sesuai dengan yang diminta. Tidak menutup kemungkinan perhitungan kembali dilakukan jika memang diminta. "Semua tergantung Polda yang melakukan penyidikan," kata Adi.

Sementara antara BPK dan Polda senantiasa berkoordinasi dalam pengusutan kasus Bansos.

BPK sendiri telah menunjuk seorang auditornya secara resmi untuk memberikan keterangan ahli bagi kepentingan penyidikan. "Polda meminta bantuan keterangan ahli, dan kita selalu siap. Seorang auditor telah ditugaskan untuk itu," kata Adi.

Mencuatnya kasus bansos ini bermula dari hasil audit

regular yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2008.

Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion.

Penyebab DO, BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya. Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Dari hasil penelitian PDTT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara.

Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK Perwaki-

lan Kalbar dan BPK Pusat yang hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah.

Empat item itu adalah temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp10,07 miliar.

Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Praon sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp8,59 miliar. Yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp2,114 miliar. (stm)